

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

LAPORAN KEUANGAN TAHUN TAHUN 2025 (*Audited*)



Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jln Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, Mei 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

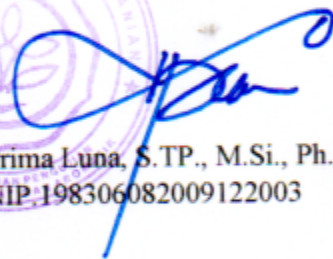
Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 14 (*Audited*) tahun 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bogor, Mei 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik




Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	39
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	61
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	74
F. Pengungkapan Penting Lainnya	82
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.A1. Anggaran Satuan Kerja Tahun 2022 - 2025	10
Tabel.B.1. Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025	31
Tabel.B.2. Anggaran dan Realisasi PNBPA Lainnya TA 2025 dan 2024	31
Tabel.B.3. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025	32
Tabel.B.4. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	33
Tabel.B.5. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	33
Tabel.B.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	34
Tabel.B.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	34
Tabel.B.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan	35
Tabel.B.9. Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker 2025	36
Tabel.B.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker 2025	36
Tabel.B.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	36
Tabel.B.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	37
Tabel.B.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	37
Tabel.B.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025	37
Tabel.B.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	38
Tabel.C.1. Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel.C.2. Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel.C.3. Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel.C.4. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel.C.5. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel.C.6. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel.C.7. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel.C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel.C.9. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel.C.10. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel.C.11. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel.C.12. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel.C.13. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	45
Tabel.C.14. Rincian Tanah Berdasarkan NUP	46
Tabel.C.15. Rekap Aset Tetap Tanah Sudah Bersertifikat	46
Tabel.C.16. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	48
Tabel.C.17. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	49
Tabel.C.18. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	49
Tabel.C.19. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	50
Tabel.C.20. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	51

	Halaman
Tabel.C.21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	52
Tabel C.22. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel C.23. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel C.24. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel C.25. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel C.26. Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel C.27. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	55
Tabel C.28. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	56
Tabel C.29. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	56
Tabel C.30. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 30 Desember 2025 dan 2024	56
Tabel C.31. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024	57
Tabel C.32. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	58
Tabel C.33. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Desember 2025 dan 2024	58
Tabel C.34. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel C.35. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel D.1 Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024	61
Tabel D.2. Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024	61
Tabel D.3. Perbandingan Pendapatan Operasional Tahun 2025 di LRA dengan LO	62
Tabel D.4. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	63
Tabel D.5. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	63
Tabel D.6. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024	64
Tabel D.7. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	64
Tabel D.8. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	65
Tabel D.9. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO	65
Tabel D.10. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	66
Tabel D.11. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	67
Tabel D.12. Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024	68
Tabel D.13. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 LRA dengan LO	68
Tabel D.14. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	69
Tabel D.15. Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO	69
Tabel D.16. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	69
Tabel D.17. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024	70
Tabel D.18. Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	71
Tabel D.19. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025	71

		Halaman
Tabel D.20.	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	72
Tabel D.21.	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024	73
Tabel E.1.	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025	74
Tabel E.2.	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025	75
Tabel E.3.	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025	76
Tabel E.4.	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025	77
Tabel E.5.	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 dan 2024	78
Tabel E.6.	Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025	80
Tabel E.7.	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025	80
Tabel E.8.	Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025	80
Tabel F.1.	Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.4	Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 ⁴
Lampiran B.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 ⁴
Lampiran C.1	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 – Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.2	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 –Rekening Lainnya
Lampiran C.3	Tanah Dikuasai dan/atau Dicatat Sebagai Aset Pihak Lain
Lampiran C.4	Data Tuntutan Perkara Gugat Tahun 2024
Lampiran C.5	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025
Lampiran C.6	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025
Lampiran F.1	Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025
Lampiran F.2	Rekap Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Lampiran F.3	Rekap SK Penghapusan BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Lampiran F.4	Monitoring Penetapan Status Penggunaan BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Berdasarkan Data Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Per Tanggal 31 Desember 2025

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp661.247.247,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 111,85% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp591.198.000,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.331.221.486,00 atau mencapai 95,87 % dari alokasi anggaran sebesar Rp14.947.856.000,00.

Realisasi anggaran TA 2025 tidak dapat optimal karena adanya *self blokir* sebesar Rp566.755.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.795.151.494.002,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp114.650.862,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.794.987.700.015,00; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp49.144.125,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp12.795.151.495.002,00;

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp656.590.287,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp17.472.742.846,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp((16.816.152.559,00)). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.656.960,00 dan Rp(16.811.495.599,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(16.811.495.599,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp12.791.566.180.562,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(15.396.236.428,00) kemudian dikurangi dengan koreksi-

koreksi sebesar Rp155.080.400,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.241.729.639,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp12.795.151.495.002,00.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	591.198.000	661.247.247	111,85	888.548.477
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	591.198.000	661.247.247	111,85	888.548.477
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		591.198.000	661.247.247	111,85	888.548.477
BELANJA NEGARA	B.2	14.947.856.000	14.331.221.486	95,87	14.751.391.746
Belanja Pegawai	B.2.1	7.388.417.000	7.365.572.187	99,69	7.783.697.049
Belanja Barang	B.2.2	7.504.439.000	6.915.949.299	92,16	6.967.694.697
Belanja Modal	B.2.3	55.000.000	49.700.000	90,36	-
JUMLAH BELANJA NEGARA		14.947.856.000	14.331.221.486	95,87	14.751.391.746

Bogor, Mei 2026
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

II. NERACA

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
NERACA
PERIODE 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	237.225.000
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.6	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.8	0	0
Persediaan	C.9	114.650.862	267.476.680
JUMLAH ASET LANCAR		114.650.862	504.701.680
ASET TETAP			
Tanah	C.10	12.752.814.341.884	12.752.814.341.884
Peralatan dan Mesin	C.11	36.464.274.143	29.651.391.743
Gedung dan Bangunan	C.12	47.025.720.647	47.025.720.647
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.13	3.359.376.100	3.359.376.100
Aset Tetap Lainnya	C.14	184.312.480	184.312.480
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	65.718.000	65.718.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.16	(44.926.043.239)	(42.055.508.847)
JUMLAH ASET TETAP		12.794.987.700.015	12.791.045.352.007
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.17	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.18	0	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.19	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.20	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.21	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.22	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.23	81.723.000	36.275.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.24	0	0
Aset Lain-lain	C.25	1.297.940.113	1.302.240.113

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.26	(1.330.518.988)	(1.322.388.238)
JUMLAH ASET LAINNYA		49.144.125	16.126.875
JUMLAH ASET		12.795.151.495.002	12.791.566.180.562
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.29	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	12.795.151.495.002	12.791.566.180.562
JUMLAH EKUITAS		12.795.151.495.002	12.791.566.180.562
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.795.151.495.002	12.791.566.180.562

Bogor, Mei 2026
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

(dalam Rupiah)					
Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	656.590.287	746.607.051	(90.016.764)	(12,06)
JUMLAH PENDAPATAN		656.590.287	746.607.051	(90.016.764)	(12,06)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	7.365.572.187	7.783.697.049	(418.124.862)	(5,37)
Beban Persediaan	D.3	542.760.151	268.143.580	274.616.571	102,41
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.087.163.778	4.506.618.632	(419.454.854)	(9,31)
Beban Pemeliharaan	D.5	1.782.917.939	1.846.987.105	(64.069.166)	(3,47)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	519.811.649	295.624.800	224.186.849	75,83
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	291.552.000	201.593.900	89.958.100	44,62
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.882.965.142	2.293.929.419	589.035.723	25,68
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	0	0	0	0,00
JUMLAH BEBAN		17.472.742.846	17.196.594.485	276.148.361	1,61
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.816.152.559)	(16.449.987.434)	(366.165.125)	2,23
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		0	52.610.400	(52.610.400)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0	52.610.400	(52.610.400)	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	0	0	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.656.960	89.331.026	(84.674.066)	(94,79)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	4.656.960	89.331.026	(84.674.066)	(94,79)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	0	0	0	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.656.960	141.941.426	(137.284.466)	(96,72)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.811.495.599)	(16.308.046.008)	(503.449.591)	3,09
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.14	0	0	0	0,00
BEBAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.16	(16.811.495.599)	(16.308.046.008)	(503.449.591)	3,09

Bogor, Mei 2026
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	12.791.566.180.562	12.794.003.008.301
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(15.396.236.428)	(16.308.046.008)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	155.080.400	(198.400.000)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	155.080.400	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	(198.400.000)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	20.241.729.639	14.069.618.269
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	14.093.996.486	14.720.591.746
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(661.247.247)	(888.548.477)
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	350.000	350.000
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	6.808.630.400	237.225.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	3.585.314.440	(2.436.827.739)
EKUITAS AKHIR	E.6	12.795.151.495.002	12.791.566.180.562

Bogor, Mei 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik merupakan entitas berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 3 Bogor Jawa Barat, mempunyai tugas

- Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat, dan aromatik dan penilaian kesesuaian;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian/Lembaga (K/L) agar menyusun Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 untuk seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi Sakti dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp14.014.063.000,00 Selama periode berjalan, Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah melakukan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp 14.947.856.000,00

Tabel.A.1. Anggaran Satuan Kerja Tahun 2022 - 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	14.947.856.000
2024	15.258.592.000
2023	15.579.092.000
2022	22.433.200.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada

masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu

BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan

- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506/KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

- a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
 - 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain

adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;

- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp661.247.247,00 atau 111,85% dari anggaran sebesar Rp591.198.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
425	Pendapatan PNBPA Lainnya				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	365.200.000	451.724.700	123,69	614.193.201
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	200.000.000	177.047.950	88,52	154.374.250
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	25.998.000	27.769.000	106,81	30.646.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	48.637	0	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	4.656.960	0,00	89.335.026
Jumlah		591.198.000	661.247.247	111,85	888.548.477

Realisasi PNBPA TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1**

B.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp661.247.247,00 atau 111,85% dari anggaran pendapatan PNBPA Lainnya sebesar Rp591.198.000,00. Realisasi pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(227.301.230) atau (34,37)% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025.

Tabel B.2. Anggaran dan Realisasi PNBPA Lainnya TA 2025 dan 2024

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Pen urunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	365.200.000	451.724.700	614.193.201	(162.468.501)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	200.000.000	177.047.950	154.374.250	22.673.700
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	25.998.000	27.769.000	30.646.000	(2.877.000)
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	48.637	0	48.637
Pendapatan Denda	0	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	4.656.960	89.335.026	(84.678.066)
Jumlah	591.198.000	661.247.247	888.548.477	(227.301.230)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp451.724.700,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, susu, dll).
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp177.047.950,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, yaitu Pengujian Laboratorium
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp27.769.000,00.
4. Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp48.637,00 hasil pendapatan tersebut merupakan pengembalian bunga bank pada rekening penampungan lainnya.
5. Pendapatan lain-lain sebesar Rp4.656.960,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.3. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	4.656.960	Pengembalian atas kelebihan belanja tunjangan suami, tunjangan beras dan tunjangan anak
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	4.656.960	-

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik .
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (429111) sebesar Rp4.656.960,00.

Pengembalian ini merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran anatara lain :

- a. Tunjangan suami dan tunjangan beras atas nama Nurlela sebesar Rp3.321.440,00.
- b. Tunjangan anak ata nama Hariry Riyadi sebesar Rp1.335.520,00.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNPB per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp14.331.221.486,00 atau 95,87% dari anggaran belanja sebesar Rp14.947.856.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.4. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	7.388.417.000	7.365.572.187	99,69	7.783.697.049
Belanja Barang	7.504.439.000	6.915.949.299	92,16	6.967.694.697
Belanja Modal	55.000.000	49.700.000	90,36	0
Jumlah	14.947.856.000	14.331.221.486	95,87	14.751.391.746

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.5. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0,00	0
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	624.119.000	614.049.258	98,39	304.376.680
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0,00	0
Program Dukungan Manajemen	14.323.737.000	13.717.172.228	95,77	14.447.015.066
Jumlah	14.947.856.000	14.331.221.486	95,87	14.751.391.746

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.3**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(420.170.260,00) atau (2,85)%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan :

1. Ada sejumlah Pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
2. Adanya blokir belanja barang pada beberapa kegiatan
3. Pembukaan blokir terkait penggunaan PNPB pada bulan September.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.365.572.187,00 dan Rp7.783.697.049,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(418.124.862,00) atau (5,37)% dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut terjadi karena adanya sejumlah pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

Secara rinci jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.4**

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025.

Tabel B.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	7.006.854.000	6.989.118.270	99,75	7.582.474.767
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	373.552.000	369.048.917	98,79	201.222.282
Belanja Lembur	8.011.000	7.405.000	92,44	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	7.388.417.000	7.365.572.187	99,69	7.783.697.049

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.5**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.915.949.299,00 dan Rp6.967.694.697,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	3.752.331.000	3.610.202.427	96,21	3.793.049.160
Belanja Barang Operasional	2.302.850.000	2.297.629.049	99,77	2.322.250.680
Belanja Barang Non Operasional	909.197.000	785.887.445	86,44	1.151.634.320
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	540.284.000	526.685.933	97,48	319.164.160
Belanja Jasa	1.004.058.000	1.003.647.284	99,96	1.032.733.632
Belanja Jasa	1.004.058.000	1.003.647.284	99,96	1.032.733.632
Belanja Pemeliharaan	1.786.850.000	1.782.287.939	99,74	1.846.287.105
Belanja Pemeliharaan	1.786.850.000	1.782.287.939	99,74	1.846.287.105
Belanja Perjalanan Dinas	961.200.000	519.811.649	54,08	295.624.800
Belanja Perjalanan DN	961.200.000	519.811.649	54,08	295.624.800
Belanja Perjalanan LN	0	0	0	0
Belanja BLU	0	0	0	0
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0	0
Jumlah	7.504.439.000	6.915.949.299	0	6.967.694.697

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp526.685.933,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0,00	0
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	540.284.000	526.685.933	97,48	319.164.160
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	533.184.000	519.637.858	97,46	319.164.160
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	7.100.000	7.048.075	99,27	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	540.284.000	526.685.933	97,48	319.164.160

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.6**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.9. Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 untuk (disebutkan jumlah) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker 2025

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
-	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidu oleh Inspektorat sebesar Rp0,00.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp49.700.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan Rp49.700.000,00 atau 90,36% dibandingkan periode TA 2024.

Tabel B.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000	49.700.000	90,36	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	55.000.000	49.700.000	90,36	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.7.**

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp49.700.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp49.700.000,00 atau 90,36% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000	49.700.000	90,36	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Jumlah	55.000.000	49.700.000	90,36	0

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel B.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel B.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

4. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Modal Lainnya .

Tabel B.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.795.151.495.002,00 dan Rp12.791.566.180.562,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.585.314.440,00 atau 0,03%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	114.650.862	504.701.680
Aset Tetap	12.794.987.700.015	12.791.045.352.007
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	49.144.125	16.126.875
Jumlah	12.795.151.495.002	12.791.566.180.562

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp114.650.862,00 dan Rp504.701.680,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp390.050.818,00 atau 77,28%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	237.225.000
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	114.650.862	267.476.680
Jumlah	114.650.862	504.701.680

C.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0		0
2	Bank BRI No.Rekening 650172373061000	0		0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1**.

C.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel C.4. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank	0	0	0
Jumlah				

Bendahara penerimaan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tidak mempunyai rekening penerimaa, seluruh penerimaan di setorkan oleh pengguna jasa/wajib pajak ke kas negara secara langsung.

C.3. Kas Lainnya Dan Setara Kas

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp237.225.000,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami perubahan, apabila dibandingkan dengan saldo Kas

Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	237.225.000	-237.225.000
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	237.225.000	-237.225.000

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan saldo jasa giro dari rekening penampungan lainnya (RPL) untuk pembiayaan kerjasama/kemitraan dengan BRMP dengan judul kegiatan Penguatan Hilirisasi Produk Minuman Fungsional Untuk Peningkatan Daya Saing Dan Nilai Tambah. Dana kegiatan tersebut ditampung di rekening nomor 001201004947308 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00;

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan saldo jasa giro dari rekening penampungan lainnya (RPL) untuk pembiayaan kerjasama/kemitraan dengan BRMP dengan judul kegiatan Integrasi Teknologi Budidaya Tanaman Atsiri di Kawasan Pertanaman Mangga untuk Pengendalian Hama Lalat Buah dan Meningkatkan Nilai Tambah. Dana kegiatan tersebut ditampung di rekening nomor 001201004963304 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00;

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Rekening Penampungan Lainnya bersumber dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan saldo kas hibah langsung yang telah disahkan yaitu: Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2SMP97TA, digunakan untuk membiayai proyek *Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses* dengan periode 22 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2026. Dana hibah tersebut ditampung di rekening nomor 001201004151305 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00;

C.4. Belanja Dibayar Dimuka (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah			0	0	0
	Total		0	0	0

C.5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,0%.

Tabel C.7. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	30 September 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah				

C.6. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 September 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan		0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi		0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan		0	0	0
4258	Pendapatan Denda		0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain		0	0	0
Jumlah			0	0	0

C.7. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

Tabel C.9. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

Tabel C.10. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp114.650.862,00 dan Rp267.476.680,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(152.825.818,00) atau (57,14)% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	2.290.000	4.438.000	(2.148.000)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	630.000	(630.000)
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	81.034.500	217.156.100	(136.121.600)
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	31.326.362	45.252.580	(13.926.218)
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah		114.650.862	267.476.680	(152.825.818)

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.794.987.700.015,00 dan Rp12.791.045.352.007,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.942.348.008,00 atau 0,03% apabila

dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	12.752.814.341.884	12.752.814.341.884	0
2	Peralatan dan Mesin	36.464.274.143	29.651.391.743	6.812.882.400
3	Gedung dan Bangunan	47.025.720.647	47.025.720.647	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.359.376.100	3.359.376.100	0
5	Aset Tetap Lainnya	184.312.480	184.312.480	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.718.000	65.718.000	0
8	Akumulasi Penyusutan	(44.926.043.239)	(42.055.508.847)	(2.870.534.392)
Jumlah		12.794.987.700.015	12.791.045.352.007	3.942.348.008

C.10. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.752.814.341.884,00 dan Rp12.752.814.341.884,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	12.752.814.341.884
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 20xx	12.752.814.341.884

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	10	9.991.277.701.680	9.991.277.701.680	0
2	2	177.373.692.000	177.373.692.000	0
3	3	101.431.720.000	101.431.720.000	0
4	4	3.680.332.000	3.680.332.000	0
5	5	3.557.502.000	3.557.502.000	0
6	6	3.522.450.000	3.522.450.000	0
7	7	4.364.775.000	4.364.775.000	0
8	8	955.334.000	955.334.000	0
9	9	22.974.438.000	22.974.438.000	0
10	4	1.882.540.800.000	1.882.540.800.000	0
11	1	299.084.632.000	299.084.632.000	0
12	6	167.543.600.000	167.543.600.000	0
13	7	6.497.720.000	6.497.720.000	0
14	8	66.525.684.000	66.525.684.000	0
15	9	8.852.716.000	8.852.716.000	0
16	1	12.631.245.204	12.631.245.204	0
Jumlah		12.752.814.341.884	12.752.814.341.884	0

Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp12.752.814.341.884,00 telah didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.15. Rekap Aset Tetap Tanah Sudah Bersertifikat

No.	NUP	Lokasi (Kota/Kab)	Luasan M2	Nilai Perolehan (Rp)	Bukti Kepemilikan
1	10	KP. Cimanggu - Kota Bogor	428.560	9.991.277.701.680	Sertifikat No. 7710029
2	2	Puspasari - Cibinong - Kab Bogor	51.270	177.373.692.000	Sertifikat No. B 2270579
3	3	Puspasari - Cibinong - Kab Bogor	34.775	101.431.720.000	Sertifikat No. 2270580
4	4	KP. Citayam - Kab. Bogor	4.775	3.680.332.000	Sertifikat No. 8246724
5	5	KP. Citayam - Kab. Bogor	4.885	3.557.502.000	Sertifikat No. 7873066
6	6	KP. Citayam - Kab. Bogor	4.600	3.522.450.000	Sertifikat No. 7701022
7	7	KP. Citayam - Kab. Bogor	5.700	4.364.775.000	Sertifikat No. 8246725
8	8	KP. Citayam - Kab. Bogor	1.645	955.334.000	Sertifikat No. 7716185
9	9	Kayu Manis - Kota Bogor	17.503	22.974.438.000	Sertifikat No. AI 205559
10	4	KP. Manoko - Kab Bandung Barat	207.000	1.882.540.800.000	Sertifikat No. AL 070389
11	1	KP. Sukamulya - Kab Sukabumi	485.527	299.084.632.000	Sertifikat No. AA 699909
12	6	KP. Laing-Solok - Kota solok	478.696	167.543.600.000	Sertifikat No. 03/2000
13	7	KP. Laing-Solok - Kota solok	21.304	6.497.720.000	Sertifikat No. 08/2000
14	8	KP. Laing-Solok - Kota solok	201.288	66.525.684.000	Sertifikat No. 04/2000
15	9	KP. Laing-Solok - Kota solok	28.696	8.852.716.000	Sertifikat No. 09/2000
16	1	KP. Cicurug - Kab Sukabumi	80.996	12.631.245.204	Sertifikat No. 252/1972
Jumlah			2.057.220	12.752.814.341.884	

Dari 16 bidang tanah yang bersertifikat hanya 4 bidang tanah yang sudah mempunyai sertifikat atas nama pememrintah RI.

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 2 bidang tanah dikuasai dan/atau dicatat sebagai aset pihak lain dengan nilai perolehan sebesar Rp105.112.052.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah berlokasi KP Cibinong. Desa Kranggan, RT 001, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kab Bogor, Provinsi Jawa Barat Dengan kode NUP 3 terdapat

pengusahaan secara tidak sah dan penjualan lahan dari total luas 34.775 m², yang diokupasi seluas 10.035 m² dan diperjualbelikan.

2. Tanah berlokasi KP Citayam Citayam 01 Citayam, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, dengan kode NUP 4. Masuk dalam sengketa pengadilan dengan uraian sebagai berikut :
 - A. Sengketa Pengadilan. Dikuasai dan SHM No.7802 Desa Ragajaya a.n H. Masdi (Seluas : 4.298 m²)
 - B. Setelah keluar Hasil Keputusan Sidang Nomor : 269/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 dan memasang kembali Plang Nama di Lokasi Tanah Kebun Percobaan Milik Kementerian Pertanian yang telah di okupasi oleh pihak lain atas nama H. Masdi yang terletak di Desa Citayam, Kabupaten Bogor tanggal 26 November 2024.
 - C. BRMP TROA telah menerima Surat Tembusan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat :
 - a) Perihal Mohon Informasi dan Data kepada Kepala Bagian tata Pemerintahan Setda kab. Bogor, Kepala Bagian Perundang-undangan Setda Kab. Bogor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Bogor dengan Nomor Surat MP.01.01/1016-32/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
 - b) Perihal Mohon Informasi dan Data kepada Kepala Desa Citayam dengan Nomor Surat MP.01.01/1017-32/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
 - c) Perihal Mohon Informasi dan Data kepada Kepala Desa Ragajaya dengan Nomor Surat MP.01.01/1018-32/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
Surat tersebut merupakan sebuah tindak lanjut dari surat permohonan BRMP TROA Nomor B-536/PL.310/H.4.3/06/2021 tanggal 16 September 2021 perihal permohonan pembatalan sertifikat hak milik nomor 7802 atas nama H. Masdi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
 - D. Sebagai tindak lanjut klaim Tanah Kebun Percobaan Cibinong milik Kementerian Pertanian di Desa Puspasari Kabupaten Bogor dengan luas 34.775 m². BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat pembatalan sertifikat dengan nomor surat MP.02.01/810-32/III/2025 tanggal 14 Maret 2025. Dalam isi suratnya BPN Kanwil telah membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2516/Puspasari atas nama Hery Kurniadhy, Hak Milik Nomor 2517/Puspasari dan Hak Milik Nomor 2518/Puspasari keduanya atas nama H. Dayat Teo, SIP., M. M. serta Hak Milik Nomor 2519/Puspasari atas nama Sukasna terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor.

Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran C.3. – C.4**

C.11. Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp36.464.274.143,00 dan Rp29.651.391.743,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.812.882.400,00 atau 22,98% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan

dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	29.651.391.743
B	Mutasi Tambah	6.812.882.400
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	49.700.000
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	6.763.182.400
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin 30 September 2025	36.464.274.143

Kenaikan Aset tetap di karenakan penerimaan hibah langsung Barang dan Jasa, yang berasal dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2SMP97TA, digunakan untuk mendukung kegiatan proyek *Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses*. Dan pengadaan alat melalui belanja modal berupa peralatan lab.

C.12. Gedung Dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp47.025.720.647,00 dan Rp47.025.720.647,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	47.025.720.647
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan 30 September 2025	47.025.720.647

C.13. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.359.376.100,00 dan Rp3.359.376.100,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	3.359.376.100
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 30 September 2025	3.359.376.100

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp184.312.480,00 dan Rp184.312.480,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	184.312.480
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 30 September 2025	184.312.480

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp65.718.000,00 dan Rp65.718.000,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2023	65.718.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	65.718.000

Kontruksi dalam Pengerjaan dengan nilai Rp65.718.000,00 berupa jasa konsultasi yang fisiknya tidak dilaksanakan. Terhadap Kontruksi dalam Pengerjaan tersebut telah di usulkan penghapusan ke Sekretariat BRMP pada tanggal 1 Agustus 2023. Usulan penghapusan dari Setjen pada tanggal 28 November 2024, dan persetujuan dari KPKNL pada tanggal 26 September 2024. Saat ini sedang dalam proses penetapan Surat Keputusan penghapusan di Setjen dan surat permohonan penetapan SK di sampaikan tanggal 2 Juli 2024. Dan dilakukan kembali pengajuan ulang dengan nota dinas nomor 1105/PL.230/H.4.3/10/2025 tanggal 29 Oktober 2025

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2025 menurut (satker) disajikan pada **Lampiran C.5.**

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(44.926.043.239,00) dan Rp(42.055.508.847,00) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.870.534.392,00 atau 6,82% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(30.213.476.557)	(28.799.505.756)	1.413.970.801
2	Gedung dan Bangunan	(12.368.098.104)	(10.985.145.184)	1.382.952.920
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(2.344.468.578)	(2.270.857.907)	73.610.671
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(44.926.043.239)	(42.055.508.847)	2.870.534.392

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.413.970.801	1.413.970.801	0
2	Gedung dan Bangunan	1.382.952.920	1.382.952.920	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	73.610.671	73.610.671	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		2.870.534.392	2.870.534.392	0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.17. Properti Investasi

Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.18. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.23. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.24. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.19. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.26. Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.21. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.22. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49.144.125,00 dan Rp16.126.875,00. Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp33.017.250,00 atau 204,73% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	81.723.000,	36.275.000,	45.448.000
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0,	0,	0
3	Aset Lain-lain	1.297.940.113,	1.302.240.113,	-4.300.000
4	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	(1.330.518.988,)	(1.322.388.238,)	(8.130.750)
Jumlah		49.144.125	16.126.875	33.017.250

C.23. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp81.723.000,00 dan Rp36.275.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.448.000,00 atau 125,29% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB (periode) 2024	36.275.000
1	Saldo Awal	36.275.000
B	Mutasi Tambah	45.448.000
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya (Hibah)	45.448.000
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB (periode) 2025	81.723.000

Tabel C.29. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0		0
2	Paten	14.675.000	14.675.000	0
3	Software	45.448.000	0	45.448.000
4	Lisensi	0		0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0		0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	21.600.000	21.600.000	0
Jumlah		81.723.000	36.275.000	45.448.000

Penambahan saldo aset tak berwujud didapat dari hibah barang yang berbentuk sofeware dari kerjasama dengan Hirata Corporation.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.6**.

C.24. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

C.25. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.297.940.113,00 dan Rp1.302.240.113,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.300.000,00 atau 0,33% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penuruna n) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah			0
		Peralatan dan Mesin	1.297.940.113	1.302.240.113	(4.300.000)
		Gedung dan Bangunan			0
		Jalan Irigasi Jaringan			0
		Aset Tetap Lainnya			0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud			0
Jumlah			1.297.940.113	1.302.240.113	-4.300.000

Penghapusan terhadap aset yang di henti gunakan dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor : 370/Kpts/PL.320/A/05/2025. Dengan jenis aset berupa barang AC. Split dengan nilai perolehan sebesar Rp.4.300.000,00,-.

C.26. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(1.330.518.988,00) dan Rp(1.322.388.238,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp(8.130.750,00) atau (0,61)% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.32. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta			0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	(1.330.518.988)	(1.322.388.238)	(8.130.750)
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah	(1.330.518.988)	(1.322.388.238)	(8.130.750)
	Total	(1.330.518.988)	(1.322.388.238)	(8.130.750)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.33. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.27. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.34. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
Total		0	0		

C.28. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.35. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNBP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		6.834.417	2.047.833	4.786.584

C.29. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Uang muka dari KPPN terdiri dari dua sumber pembiayaan yaitu dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp72.000.000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.25.000.000,00.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.30. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

EKUITAS

C.31. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 12.795.151.495.002,00 dan Rp12.791.566.180.562,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.585.314.440.00 atau 0,03% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	656.590.287	746.607.051
Beban Operasional	17.472.742.846	17.196.594.485
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(16.816.152.559)	(16.449.987.434)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp656.590.287,00 dan Rp746.607.051,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(90.016.764,00), atau (12,06)% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

Tabel D.2 Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Selisih (Rp)	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	335.457.700	404.759.950	-69.302.250	-17,12
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	116.267.000	156.822.851	-40.555.851	-25,86
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	177.047.950	154.374.250	22.673.700	14,69
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	27.769.000	30.646.000	-2.877.000	-9,39
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	48.637	0	48.637	0
Jumlah	656.590.287	746.607.051	(90.012.764)	-12,06

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp656.590.287,00 dan Rp746.607.051,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(90.016.764,00), atau (12,06)% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp661.247.247,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp656.590.287,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.656.960,00.

Selisih antara LRA dan LO, merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.656.960,00,00 atas pengembalian kelebihan tunjangan suami dan beras pegawai (a.n. Nurlela) Rp.3.321.440,00 atas potongan SPM gaji dari bulan Januari – April 2025. Pengembalian kelebihan tunjangan anak pegawai (a.n. Hariry Raiyadi) atas setoran PNBPN sebesar Rp1.335.520,00.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3. Perbandingan Pendapatan Operasional Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			
425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	335.457.700	335.457.700	0
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	116.267.000	116.267.000	0
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	177.047.950	177.047.950	0
425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	27.769.000	27.769.000	0
425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	48.637	48.637	0
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.656.960	0	4.656.960
Jumlah	661.247.247	656.590.287	4.656.960

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.472.742.846,00 dan Rp17.196.594.485,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp276.148.361 atau 1.61% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.365.572.187,00 dan Rp7.783.697.049,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (418.124.862) atau (5,37)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	6.989.118.270	7.582.474.767	(593.356.497)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara			0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS			0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	369.048.917	201.222.282	167.826.635
Beban Lembur	7.405.000		7.405.000
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			0
Jumlah	7.365.572.187	7.783.697.049	(418.124.862)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	6.989.118.270	6.989.118.270	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	369.048.917	369.048.917	0
Belanja/Beban Lembur	7.405.000	7.405.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	7.365.572.187	7.365.572.187	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih antara realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp542.760.151,00 dan Rp268.143.580,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp274.616.571,00 atau 102,41%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	542.760.151	268.143.580	274.616.571
Beban Pemeliharaan	0	0	0

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban BLU	0	0	0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	542.760.151	268.143.580	274.616.571

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	526.685.933	542.760.151	(16.074.218)
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	526.685.933	542.760.151	(16.074.218)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp(16.074.218,00). Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	-114.650.862
Saldo awal	267.476.680
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	350.000
Koreksi Nilai Persediaan	155.080.400
SP2D terbit setelah Periode Pelaporan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Persediaan Pemeliharaan	-630.000
Beban Persediaan Hewan Tan Diserahkan	-291.552.000
Jumlah	16.074.218

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.087.163.778,00 dan Rp4.506.618.632,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(419.454.854,00) atau (9,31)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.297.629.049	2.322.250.680	(24.621.631)
Beban Barang Non Operasional	785.887.445	1.151.634.320	(365.746.875)
Beban Kontribusi dan Kompensasi			0
Beban Barang Persediaan	0	0	0
Beban Jasa			
Beban Jasa	1.003.647.284	1.032.733.632	(29.086.348)
Jumlah	4.087.163.778	4.506.618.632	(419.454.854)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang	3.083.516.494	3.083.516.494	0
Belanja/Beban Barang Operasional	2.297.629.049	2.297.629.049	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	785.887.445	785.887.445	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa	1.003.647.284	1.003.647.284	0
Belanja/Beban Jasa	1.003.647.284	1.003.647.284	0
Jumlah	4.087.163.778	4.087.163.778	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih antara realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.782.917.939,00 dan Rp1.846.987.105,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(64.069.166,00) atau (3,47)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024

Tabel D.10. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.040.196.785	910.969.500	129.227.285
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	742.091.154	935.317.605	(193.226.451)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	630.000	700.000	(70.000)
Beban Persediaan Suku cadang			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	1.782.917.939	1.846.987.105	(64.069.166)

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp1.782.287.939,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar Rp630.000,00 dengan nilai LO sebesar Rp1.782.917.939,00.

Tabel D.11. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.040.196.785	1.040.196.785	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	742.091.154	742.091.154	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	630.000	(630.000)
Beban Persediaan Suku cadang		0	
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel		0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		0	
Jumlah	1.782.287.939	1.782.917.939	(630.000)

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	(630.000)
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	

Uraian	Nilai
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jumlah	(630.000)

Selisih saldo sebesar Rp630.000,00 merupakan beban persediaan untuk pemeliharaan yang sudah di keluarkan dari catatan persediaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp519.811.649,00 dan Rp295.624.800,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp224.186.849 atau 75,83% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas dengan LRA sebesar Rp519.811.649,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO tidak ada perbedaan.

Tabel D.12. Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	515.621.649	259.220.800	256.400.849
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.190.000	2.500.000	1.690.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		13.500.000	(13.500.000)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		20.404.000	(20.404.000)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			0
Belanja Perjalanan			0
Jumlah	519.811.649	295.624.800	224.186.849

Tabel D.13. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	515.621.649	515.621.649	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.190.000	4.190.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	519.811.649	519.811.649	0

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp291.552.000,00 dan Rp201.593.900,00. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	291.552.000	201.593.900	89.958.100
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	291.552.000	201.593.900	89.958.100

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.15. Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	291.552.000	(291.552.000)
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	291.552.000	(291.552.000)

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.882.965.142,00 dan Rp2.293.929.419,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp589.035.723,00 atau 20,43%

apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.16. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	1.413.970.801	715.314.540	698.656.261
		Gedung dan Bangunan	1.382.952.920	1.503.784.119	(120.831.199)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	73.610.671	73.610.671	0
		Aset Tetap Lainnya	0		0
	Jumlah		2.870.534.392	2.292.709.330	577.825.062
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	141.250	292.589	(151.339)
		Software	11.362.000	0	11.362.000
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	927.500	927.500	0
	Jumlah		12.430.750	1.220.089	11.210.661
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			2.882.965.142	2.293.929.419	589.035.723

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.17. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(16.816.152.55),00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp366.165.125,00 atau 2,23% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(16.449.987.434,00).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.18. Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Sirplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	52.610.400
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.656.960	89.331.026
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4.656.960	141.941.426

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp 52.610.400,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (52.610.400,00) atau (100)% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp52.610.400,00.

Tabel D.19. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.656.960,00 dan Rp89.331.026,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(84.674.066,00) atau (94,79)% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.656.960,00 dan Rp89.331.026,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(84.674.066,00) atau (94,79)% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.20. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian			Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	4.656.960	89.331.026	(84.674.066)
			Belanja Barang	0	0	0
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	0	0	0
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				4.656.960	89.331.026	(84.674.066)

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.21. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian			31 Desember 25 (Rp)	31 Desember 24	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
	Jumlah			0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.656.960,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp141.941.426,00 atau (96.72)% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(137.284.466,00).

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengalami Defisit LO sebesar Rp(16.811.495.599,00). Nilai defisit tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp503.449.591,00 atau 3.09% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp(16.308.046.008,00).

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.791.566.180.562,00 dan Rp12.794.003.008.301,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(2.436.827.739,00) atau 0,02% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(15.396.236.428,00) dan Rp(16.308.046.008,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp911.809.580,00 atau 5,59% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 155.080.400,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp155.080.400,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.1. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	155.080.400
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	155.080.400
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp(198.400.000,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.2. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.4. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya. Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp20.241.729.639,00 dan Rp14.069.618.269,00. Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.172.111.370,00 atau 43,87% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Dengan rincian sesuai table di bawah ini.

Tabel E.5. Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	14.093.996.486,	14.720.591.746,
2	Diterima dari Entitas Lain	-661.247.247,	-888.548.477,
3	Transfer Keluar	0,	0,
4	Transfer Masuk	350.000,	350.000,
5	Pengesahan Hibah Langsung	6.808.630.400,	237.225.000,
JUMLAH		20.241.729.639,	14.069.618.269,

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.093.996.486,00 dan Rp14.720.591.746,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp(626.595.260,00) atau (4,26)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Penurunan atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain adanya pegawai pension dan pagu blokir yang tidak dibuka sampai akhir tahun anggaran 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(661.247.247,00) dan Rp(888.548.477,00). Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(227.301.230,00) atau (25,58)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp350.000,00 dan Rp350.000,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.808.630.400,00 dan Rp237.225.000,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.571.405.400,00 atau 2770,12% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	237306	Hirata Corporation	2SMP97TA	Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses	6.808.630.400
TOTAL					6.808.630.400

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel E.7. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
TOTAL					-

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.8. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
TOTAL					-

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman rempah, Obat dan Aromatik mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp3.585.314.440,00. Nilai kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp6.022.142.179,00 atau (247,13)% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp(2.436.827.739).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.796.205.196.679,00 dan Rp12.791.844.002.916,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.585.314.440,00 atau 0,03% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Perubahan tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik bertugas menyelenggarakan perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BPSI TROA, penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai Maret 2025.

F.2. Laporan Kinerja / Capaian Output

Pada laporan kinerja/capaian output satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tidak terdapat kegiatan Prioritas Nasional, sampai dengan bulan 31 Desember 2025 realisasi belanja sebesar Rp 14.331.221.486,00 atau 95,87%, sedangkan realisasi keluaran secara seluruh telah tercapai, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian dapat di lihat pada lampiran F.1.

F.3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Proyek yang Didanai dari Hibah Luar Negeri

a. Hibah Langsung

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada Balai Perakitan dan Penujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik di Tahun 2025 sebanyak 1 proyek dalam bentuk hibah uang dan bentuk hibah barang dan jasa Hibah yang berasal dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2SMP97TA, digunakan untuk membiayai proyek *Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses* dengan periode 22 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2026. Rekapitulasi hibah langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.1. Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung

No	Hibah Bentuk Uang		Hibah Bentuk Barang dan Jasa	
	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen
1	1	USD 45.000	1	JPY 65.467.00 ekuivalen USD 438.527

1. Untuk hibah langsung berbentuk uang telah diterima dalam 2 tahap dari 3 tahap yang direncanakan dengan uraian sebagai berikut
 - Tahap pertama USD15.000 ekivalen Rp220.800.000, dan telah disahkan pendapatan dan penggunaannya. SPHL Nomor 00185T/237306/2023 tanggal 31-12-2023 dan Nomor 00248T237306/2024 tanggal 31-12-2024

- Tahap kedua USD15.000 ekivalen Rp237.225.000,00, telah di sahkan penerimaan untuk penggunaan belum disahkan atau dimuatkan dalam DIPA tahun 2025. SPHL Nomor 00248T237306/2024 tanggal 31-12-2024
- 2. Untuk hibah langsung berbentuk barang dan jasa diterima pada bulan Maret 2025 dengan nilai sebesar JYP65.467.000 ekivalen USD435.527 yang bila dirupiahkan sebesar Rp6.808.630.400,00 dan telah disahkan sebagai penerimaan dan dicatat sebagai asset SP2HL-BJS Nomor 00095T tanggal 12 September 2025.

F.4. Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP), Persetujuan BMN, dan SK Penghapusan BMB

Monitoring status Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Lingkup Kementerian Pertanian disajikan pada **LampiranF.2 – F.4.**

F.5. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN).

F.6. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. To Do List

Tidak terdapat To Do List.

2. Rekonsiliasi

Hasil rekonsialisasi tidak terdapat Transaksi Dengan Konfirmasi Rupiah (TDK RUPIAH) Transaksi Dalam Konfirmasi Chart of Account (TDK CoA).

Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Penerimaan Umum	Penerimaan Fungsional	Penerimaan BLU	Nilai
1	424113 - Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan,	0	0	0	-
2	424117 - Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	0	0	0	-
3	424118 - Pendapatan Penyediaan Barang	0	0	0	-
4	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	0	0	-
5	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	0	0	-
6	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	0	-
7	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0	0	0	-
8	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	0	0	-
9	424925 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0	-
10	425112 - Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan,	0	335.457.700	0	335.457.700
11	425119 - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	0	0	0	-
12	425121 - Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	0	0	0	-
13	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	-
14	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	-
15	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	116.267.000	0	0	116.267.000
16	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0	-
17	425139 - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0	-
18	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	0	0	-
19	425252 - Pendapatan Perizinan Pertanian	0	0	0	-
20	425289 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	177.047.950	0	177.047.950
21	425331 - Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	0	0	-
22	425411 - Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	0	0	-
23	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	0	0	-
24	425429 - Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	27.769.000	0	27.769.000
25	425432 - Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	0	0	-
26	425436 - Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	0	0	-
27	425691 - Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	0	0	-
28	425692 - Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	0	0	-
29	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	-
30	425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	48.637	0	0	48.637
31	425765 - Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	0	0	-
32	425791 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0	-
33	425792 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0	-
34	425793 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0	-
35	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	-
36	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran	4.656.960	0	0	4.656.960
37	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran	0	0	0	-
38	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran	0	0	0	-
39	425917 - Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	0	0	0	-
40	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	-
Jumlah		120.972.597	540.274.650	-	661.247.247

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN	PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan	0	0	0	0	0,00
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	0	0	0	0	0,00
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	0	0	0	0	0,00
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	0	0	0	0	0,00
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	0	0	0	0	0,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	0	0	0,00
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	0	0	0	0,00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	0	0	0	0,00
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	0	0	0	0	0,00
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	304.000.000	335.457.700	0	335.457.700	110,35
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	0	0	0	0,00
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	61.200.000	116.267.000	0	116.267.000	189,98
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0,00
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0	0	0,00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	365.200.000	451.724.700	0	451.724.700	123,69
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	0	0	0	0,00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	200.000.000	177.047.950	0	177.047.950	88,52
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	200.000.000	177.047.950	0	177.047.950	88,52
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	0	0	0	0	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	0	0	0	0,00
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	0	0	0	0,00
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	25.998.000	27.769.000	0	27.769.000	106,81
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	0	0	0	0	0,00
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	0	0	0	0,00
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	0	0	0	0,00
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	25.998.000	27.769.000	0	27.769.000	106,81
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	0	0	0	0,00
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	0	0	0	0,00
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	0	0	0	0,00
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	48.637	0	48.637	0,00
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	0	0	0	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	0	0	0	0,00
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	0	0	0	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	48.637	0	48.637	0,00
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	0	0	0	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4.656.960	0	4.656.960	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	0,00
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	4.656.960	0	4.656.960	0,00
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	591.198.000	661.247.247	0	661.247.247	111,85
	JUMLAH PENDAPATAN	591.198.000	661.247.247	0	661.247.247	111,85

**Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Kementerian Pertanian
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025**

Uraian Program Kementerian Pertanian	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Belanja Barang	-	-
	Belanja Modal	-	-
	Total	-	-
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Belanja Barang	569.119.000	564.349.258
	Belanja Modal	55.000.000	49.700.000
	Total	624.119.000	614.049.258
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Belanja Barang	-	-
	Belanja Modal	-	-
	Total	-	-
Program Dukungan Manajemen	Belanja Pegawai	7.388.417.000	7.365.572.187
	Belanja Barang	6.935.320.000	6.351.600.041
	Belanja Modal	-	-
	Total	14.323.737.000	13.717.172.228
TOTAL		14.947.856.000	14.331.221.486

Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik 31 Desember 2025

Nama Satker	Pusat				UPT				Jumlah
	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	CPNS	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	CPNS	
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik	-	-	-	-	2	45	50	8	105
JUMLAH	-	-	-	-	2	45	50	8	105

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.953.078.000	4.970.361.000	4.970.350.760	0	4.970.350.760	100,00	10.240 0
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	66.000	78.000	73.039	63	72.976	93,64	5.024 0
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	382.726.000	384.351.000	384.254.992	0	384.254.992	99,98	96.008 0
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	108.342.000	102.924.000	102.916.014	687.260	102.228.754	99,99	695.246 0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	100,00	0 0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	268.954.000	278.222.000	278.154.000	0	278.154.000	99,98	68.000 0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	35.847.000	29.972.000	29.911.448	0	29.911.448	99,80	60.552 0
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	286.061.000	280.783.000	280.772.340	0	280.772.340	100,00	10.660 0
511129	Belanja Uang Makan PNS	952.512.000	801.323.000	784.538.000	0	784.538.000	97,91	16.785.000 0
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0			0	0	0,00	0 0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	0	0	0	0	0,00	0 0
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0,00	0 0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	134.950.000	133.640.000	133.635.000	0	133.635.000	100,00	5.000 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7.130.096.000	7.006.854.000	6.989.805.593	687.323	6.989.118.270	99,76	17.735.730
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	0	0	0	0	0	0,00	0
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	0	0	0	0	0	0,00	0
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	0	0	0	0	0,00	0
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	0	0	0	0	0,00	0
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	129.724.000	242.380.000	242.315.089	0	242.315.089	99,97	64.911
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000	7.000	4.547	0	4.547	64,96	2.453
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12.974.000	21.616.000	20.919.939	0	20.919.939	96,78	696.061
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.596.000	6.106.000	5.592.819	0	5.592.819	91,60	513.181
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20.020.000	27.625.000	27.625.000	0	27.625.000	100,00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.126.000	19.377.000	18.611.940	0	18.611.940	96,05	765.060
511628	Belanja Uang Makan PPPK	28.776.000	51.386.000	48.935.000	0	48.935.000	95,23	2.451.000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	0	0	0	0	0,00	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	5.055.000	5.044.583	0	5.044.583	99,79	10.417
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	203.220.000	373.552.000	369.048.917	0	369.048.917	98,79	4.503.083
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	9.000.000	7.494.000	6.888.000	0	6.888.000	91,91	606.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	517.000	517.000	0	517.000	100,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	9.000.000	8.011.000	7.405.000	0	7.405.000	92,44	606.000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	0	0	0	0	0,00	0
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7.342.316.000	7.388.417.000	7.366.259.510	687.323	7.365.572.187	99,70	22.844.813

**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIA N BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.279.000.000	2.139.010.000	2.134.676.649	810.000	2.133.866.649	99,80	5.143.351
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	45.600.000	39.600.000	39.523.400	0	39.523.400	99,81	76.600
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	103.800.000	99.240.000	99.240.000	0	99.240.000	100,00	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0	0	0	0,00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0	0	0	0,00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	45.000.000	25.000.000	24.999.000	0	24.999.000	100,00	1.000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2.473.400.000	2.302.850.000	2.298.439.049	810.000	2.297.629.049	99,81	5.220.951
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	104.300.000	179.307.000	152.228.445	0	152.228.445	84,90	27.078.555
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	0	0	0	0,00	0
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan	0	0	0	0	0	0,00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	576.000.000	729.890.000	633.659.000	0	633.659.000	86,82	96.231.000
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	0	0	0	0	0,00	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional	0	0	0	0	0	0,00	0
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	0	0	0	0	0,00	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	0	0	0	0,00	0
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	680.300.000	909.197.000	785.887.445	0	785.887.445	86,44	123.309.555
5217	Belanja Kontribusi dan Kompensasi							
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5217	0	0	0	0	0	0,00	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	347.647.000	533.184.000	519.637.858	0	519.637.858	97,46	13.546.142
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0	0	0	0,00	0
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	0	0	0,00	0
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	7.100.000	7.048.075	0	7.048.075	99,27	51.925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	347.647.000	540.284.000	526.685.933	0	526.685.933	97,48	13.598.067
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	694.320.000	585.879.000	585.876.500	0	585.876.500	100,00	2.500
522112	Belanja Langganan Telepon	12.000.000	4.500.000	4.313.336	0	4.313.336	95,85	186.664
522113	Belanja Langganan Air	267.400.000	167.899.000	167.740.155	0	167.740.155	99,91	158.845
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	171.350.000	169.810.000	169.767.293	0	169.767.293	99,97	42.707
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0	0	0,00	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	0	0	0	0	0,00	0
522141	Belanja Sewa	0	17.700.000	17.700.000	0	17.700.000	100,00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0,00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	10.000.000	58.270.000	58.250.000	0	58.250.000	99,97	20.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1.155.070.000	1.004.058.000	1.003.647.284	0	1.003.647.284	99,96	410.716
5231	Belanja Pemeliharaan							

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	576.170.000	1.042.145.000	1.040.196.785	0	1.040.196.785	99,81	1.948.215
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung			0	0	0	0,00	0
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan			0	0	0	0,00	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	944.160.000	744.705.000	742.091.154	0	742.091.154	99,65	2.613.846
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	0	0	0	0	0	0,00	0
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	0	0	0	0	0	0,00	0
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara	0	0	0	0	0	0,00	0
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0,00	0
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0,00	0
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	0	0	0	0	0,00	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0	0	0,00	0
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0	0	0,00	0
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1.520.330.000	1.786.850.000	1.782.287.939	0	1.782.287.939	99,74	4.562.061
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.000.000	952.360.000	515.621.649	0	515.621.649	54,14	436.738.351
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	0	0	0	0	0,00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	8.840.000	4.190.000	0	4.190.000	47,40	4.650.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0	0	0,00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	215.000.000	961.200.000	519.811.649	0	519.811.649	54,08	441.388.351
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0	0	0	0,00	0
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	0	0	0	0	0,00	0
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0	0	0	0	0	0,00	0
525112	Belanja Barang	0	0	0	0	0	0,00	0
525113	Belanja Jasa	0	0	0	0	0	0,00	0
525114	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0,00	0
525115	Belanja Perjalanan	0	0	0	0	0	0,00	0
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	0	0	0	0	0,00	0
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0	0	0	0,00	0
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0	0	0	0,00	0
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk	0	0	0	0	0	0,00	0
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0	0	0	0,00	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	0	0	0	0	0,00	0
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	0	0	0	0	0,00	0
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada							
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada	0	0	0	0	0	0,00	0
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
526124	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	0	0	0	0	0	0,00	0
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana							
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi	0	0	0	0	0	0,00	0
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	0	0	0	0	0	0,00	0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	0	0	0	0	0	0,00	0
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	0	0	0	0	0	0,00	0
526313	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	0	0	0	0	0	0,00	0
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk	0	0	0	0	0	0,00	0
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6.391.747.000	7.504.439.000	6.916.759.299	810.000	6.915.949.299	92,17	588.489.701

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	0	0	0	0	0	0	0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.000.000	55.000.000	49.700.000	0	49.700.000	90,36	5.300.000
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0,00	0
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0,00	0
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0,00	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	280.000.000	55.000.000	49.700.000	0	49.700.000	90	5.300.000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00	0
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00	0
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0	0	0	0,00	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00	0
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00	0
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	0	0	0	0	0	0
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0,00	0
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0,00	0
534121	Belanja Modal Irigasi	0	0	0	0	0	0,00	0
534131	Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0	0	0,00	0
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0,00	0
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0	0	0	0,00	0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	0	0	0	0	0	0
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0	0	0,00	0
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0,00	0

	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	0	0	0	0	0	0
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	0	0	0	0	0,00	0
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	0	0	0	0	0,00	0
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	280.000.000	55.000.000	49.700.000	0	49.700.000	90	5.300.000

LAPORAN DATA REKENING PEMERINTAH PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH OBAT DAN AROMATIK
PER 31 DESEMBER 2025

BENDAHARA PENGELUARAN

No. Urut	BA	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Ijin Pembukaan Rekening	Ket.
1	018.09	237306	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	650172373061000	BPG 023 BALIT TANAMAN REMPAH DAN OBAT	BRI	S-2241/WPB.12/KP.05/2021, tgl. 28 Juni 2021	

LAPORAN DATA REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
PER 31 DESEMBER 2025

REKENING LAINNYA

No. Urut	BA	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Ijin Pembukaan Rekening	Ket.
1	018.09	237306	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	001201004151305	RPL 140 PDHL BALITTRO UNTUK 2SMP97TA	BRI	-wpb.12/KP00018708/2022, tgl. 11 Feb' 2022	Hibah
2	018.09	237306	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	001201004947308	RPL 023 KS BPSITROA UTK BRMP	BRI	S-724/KPN.1304/2025	Kerjasama

Tanah dikuasai dan/atau dicatat sebagai aset pihak lain

No	Eselon I	Lokasi	Kode Barang	Uraian	NUP	Luas	Nilai Perolehan	Provinsi	Kategori	Keterangan
1	BSIP	BPSI TROA BOGOR KP Cibinong Desa Kranggan, RT 001, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kab Bogor, Provinsi Jawa Barat	2010203003	Tanah Kebun Percobaan	3	34.775	101.431.720.000	JABAR	Sengketa Non Pengadilan	Tanah di KP Cibinong. Dari total luas 34.775 m2, yang diokupasi seluas 10.035 m2 dan diperjualbelikan
2	BSIP	BPSI TROA BOGOR KP Citayam Citayam 01 Citayam, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat	2010203003	Tanah Kebun Percobaan	4	4.775	3.680.332.000	JABAR	Sengketa Pengadilan	Sengketa Pengadilan. Dikuasai dan SHM No.7802 Desa Ragajaya a.n H. Masdi (Seluas : 4.298 m2) Perkara Selesai (Inkracht) dan sudah memiliki kekuatan

**DATA TUNTUTAN PERKARA GUGATAN
TAHUN 2024**

No	Nomor Perkara Deskripsi Perkara	Penggugat Tergugat	Status Perkara		Gugatan/Petitum		Potensi Pengeluaran Negara					Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Kementan	Amar Putusan
			Status	Keterangan	Materiil	Immateriil	Rupiah	Valas	Tanah	Immateriil	Keterangan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L	m	n
1	Nomor 269/Pdt.G/2022/PN.Cbi 2. Permasalahan Sengketa Lahan Kebun Percobaan Citayam, Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Penggugat : H. Masdi Tergugat : Kementerian Pertanian Republik Indonesia C.q Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian C.q Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan C.q Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Turut Tergugat : 1. Jamilah 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupater Bogor		PN Cibinong sudah ada Putusan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan diucapkan pada hari Kamis, 26 Juli 2023 Tidak ada Upaya Hukum Banding Perkara Selesai (<i>Inkracht</i>) dan sudah memiliki Kekuatan Hukum Tetap					4.298 m ²				Putusan PN Cibinong : DALAM KONVENSI - DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi. - DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankellijke Verklaard</i>). DALAM REKONPENSI Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankellijke Verklaard</i>). DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSI Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.469.000,- (dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 DESEMBER 2025

No	Jenis BMN	Kode Satker	Eselon I	Satker	Nama Satker	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Kondisi	Tanggal Buku Pertama	Tanggal Perolehan	Tanggal Pengapusan	Nilai Perolehan Pertama	Nilai Mutasi	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Ket KDP	
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)	018090200237306000KD	01809	237306	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	7010101003	159	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2020-03-11	2000-01-01	-	-	1	65.718.001	65.718.000	-	65.718.000	Proses Penghapusan (surat Usulan Persetujuan Penghapusan dari Setjen ke KPKNL Bogor Nomor: B-654/PL.320/A/02/2024 tanggal 23 Februari 2024)

RINCIAN ASET TAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2025

No	Jenis BMN	Kode Satker	Eselon I	satker	Nama Satker	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Kondisi	Nilai Perolehan	Tindak Lanjut Di Hapuskan
1	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	1	Hak Paten Sederhana	Baik	2.825.000	
2	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	2	Hak Paten Sederhana	Baik	675.000	
3	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	3	Hak Paten Sederhana	Baik	675.000	
4	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	4	Hak Paten Sederhana	Baik	675.000	
5	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	5	Hak Paten Sederhana	Baik	675.000	
6	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	6	Hak Paten Sederhana	Baik	675.000	
7	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	7	Hak Paten Sederhana	Baik	2.825.000	
8	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101005	8	Hak Paten Sederhana	Baik	2.825.000	
9	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101006	1	Hak Lainnya	Baik	550.000	
10	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101006	2	Hak Lainnya	Baik	550.000	
11	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101006	3	Hak Lainnya	Baik	550.000	
12	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101006	4	Hak Lainnya	Baik	700.000	
13	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101006	5	Hak Lainnya	Baik	700.000	
14	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101013	1	Paten Biasa	Baik	2.825.000	
15	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101018	1	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	Baik	7.750.000	
16	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101018	2	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	Baik	10.800.000	
17	ASET TAK BERWUJUD	018090200237306000KD	01809	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	8010101001	1	Software	Baik	45.488.000	
	TOTAL									81.763.000	

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : (018) Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Satuan Kerja : (237306) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
 Fungsi : (04) Ekonomi
 Sub Fungsi : (04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 : WA Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : (02) Jawa Barat

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
7911	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian								
AEF.110	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	26.274.000	24.858.000	94,61	66	66	orang	100,00	
BJA.104	Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	542.845.000	539.491.258	99,38	612	612	Produk	100,00	
CGA.103	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	55.000.000	49.700.000	90,36	1	1	unit	100,00	
WA	Program Dukungan Manajemen								
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian								
AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	785.000.000	266.937.812	34,00	1	1	kegiatan	100,00	
EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	7.183.500	71,84	1	1	Layanan	100,00	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	30.000.000	23.713.755	79,05	1	1	Layanan	100,00	
EBA.962	Layanan Umum	182.000.000	141.122.202	77,54	1	1	Layanan	100,00	
EBA.994	Layanan Perkantoran	13.298.737.000	13.266.850.282	99,76	1	1	Layanan	100,00	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18.000.000	12.862.000	71,46	1	1	Dokumer	100,00	
	Jumlah Belanja Bruto	14.947.856.000	14.332.718.809	95,88					Terdapat pagu blokir sebesar 566.755.000
	Pengembalian Belanja Pegawai		687.323						

Rekap Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025

NO	Satker	SK PENGHAPUSAN																	
		HIBAH			PENJUALAN			PEMUSNAHAN			PENYERTAAN			SEBAB LAIN			JUMLAH		
		Σ SK	UNIT	NILAI	Σ	UNIT	NILAI	Σ	UNIT	NILAI	Σ	UNIT	NILAI	Σ	UNIT	NILAI	Σ SK	UNIT	NILAI
	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	-	-	-	1	1	8.400.000	-	-	-				1	1	4.300.000	2	2	12.700.000
	JUMLAH	-	-	-	1	1	8.400.000	-	-	-	-	-	-	1	1	4.300.000	2	2	12.700.000

REKAP SK PENGHAPUSAN BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

NO	SATKER	SK PENGHAPUSAN												SK PENGHAPUSAN								
		HIBAH			PENJUALAN			PEMUSNAHAN			PENYERTAAN MODAL			SEBAB LAIN			ALIH STATUS			JUMLAH		
		Σ SK	UNIT	NILAI	Σ SK	UNIT	NILAI	Σ SK	UNIT	NILAI	Σ SK	UNIT	NILAI	Σ SK	UNIT	NILAI	Σ SK	UNIT	NILAI	Σ SK		NILAI
1	Balai Penrakita dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	0	0	0	1	1	8.400.000	0	0	0	0	0	0	1	1	4.300.000	0	0	0	2	2	12.700.000
JUMLAH		-	-	-	1	1	8.400.000	-	-	-	-	-	-	1	1	4.300.000	-	-	-	2	2	12.700.000

Monitoring Penetapan Status Penggunaan BMN
Berdasarkan Data Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
Per Tanggal 31 Desember 2025

No.	Nama Barang	PER JENIS BARANG											Keterangan
		Sudah PSP				Belum PSP				Total Nilai			
		Σ bidang	Σ Luas (m ²)	Nilai Perolehan	%	Σ bidang	Σ Luas (m ²)	Nilai Perolehan	%	Σ bidang	Σ Luas (m ²)	Nilai Perolehan	
1	Tanah	16	2.057.220	12.752.814.341.884	100,00%	0	0	0	0,00%	16	2.057.220	12.752.814.341.884	
2	Gedung dan Bangunan (GB)	132	21.907	47.057.243.647	100,00%	2	153	14.708.000	1,49%	134	22.060	47.071.951.647	
3	Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ)	14	7.623	3.048.032.200	100,00%	7	0	311.343.900	33,33%	21	7.623	3.359.376.100	
4	Peralatan dan Mesin (PM)	4.419	-	33.150.140.065	100,00%	1.951	0	3.434.373.181	30,63%	6.370	-	36.584.513.246	
5	Aset Tak Berwujud (ATB)	13	0	14.900.000	100,00%	3	0	21.375.000	18,75%	16	-	36.275.000	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-	-	-	Sesuai PMK 246/2014 tidak wajib di PSP-kan
7	Aset Tetap Renovasi (ATR)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-	-	-	Sesuai PMK 246/2014 tidak wajib di PSP-kan
8	Aset Tetap Lainnya	205	0	182.523.780	100,00%	36	0	200.188.700	14,94%	241	-	382.712.480	
Jumlah		4.799	2.086.750	12.836.267.181.576	1	1.999	153	3.981.988.781	0	6.798	2.086.903	12.840.249.170.357	
Persentase		71	100			2940,57%	0,73%						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK 237306

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:25 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	591,198,000	661,247,247	70,049,247	112	619,556,000	888,548,477	(268,992,477)	143
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	591,198,000	661,247,247	70,049,247	112	619,556,000	888,548,477	(268,992,477)	143
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	591,198,000	661,247,247	70,049,247	112	619,556,000	888,548,477	(268,992,477)	143
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	14,947,856,000	14,331,221,486	(616,634,514)	96	15,258,592,000	14,751,391,746	507,200,254	97
1. Belanja Pegawai	7,388,417,000	7,365,572,187	(22,844,813)	100	7,882,393,000	7,783,697,049	98,695,951	99
2. Belanja Barang	7,504,439,000	6,915,949,299	(588,489,701)	92	7,376,199,000	6,967,694,697	408,504,303	94
3. Belanja Modal	55,000,000	49,700,000	(5,300,000)	90	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK 237306

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:25 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,947,856,000	14,331,221,486	(616,634,514)	96	15,258,592,000	14,751,391,746	507,200,254	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Bogor, 5 Mei 2026



Penanggung Jawab UAKPA
Kuasas Penggunaan Anggaran

PRIMA LUNA, S.TP., M.Si., PH.D.
NIP.198306082009122003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237306) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	237,225,000	(237,225,000)	(100.00)
Persediaan	114,650,862	267,476,680	(152,825,818)	(57.14)
JUMLAH ASET LANCAR	114,650,862	504,701,680	(390,050,818)	(77.28)
ASET TETAP				
Tanah	12,752,814,341,884	12,752,814,341,884	0	0.00
Peralatan dan Mesin	36,464,274,143	29,651,391,743	6,812,882,400	22.98
Gedung dan Bangunan	47,025,720,647	47,025,720,647	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,359,376,100	3,359,376,100	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	184,312,480	184,312,480	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	65,718,000	65,718,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(44,926,043,239)	(42,055,508,847)	(2,870,534,392)	6.83
JUMLAH ASET TETAP	12,794,987,700,015	12,791,045,352,007	3,942,348,008	0.03
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	81,723,000	36,275,000	45,448,000	125.29
Aset Lain-lain	1,297,940,113	1,302,240,113	(4,300,000)	(0.33)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,330,518,988)	(1,322,388,238)	(8,130,750)	0.61
JUMLAH ASET LAINNYA	49,144,125	16,126,875	33,017,250	204.73
JUMLAH ASET	12,795,151,495,002	12,791,566,180,562	3,585,314,440	0.03

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,795,151,495,002	12,791,566,180,562	3,585,314,440	0.03
JUMLAH EKUITAS	12,795,151,495,002	12,791,566,180,562	3,585,314,440	0.03
JUMLAH EKUITAS	12,795,151,495,002	12,791,566,180,562	3,585,314,440	0.03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,795,151,495,002	12,791,566,180,562	3,585,314,440	0.03

Keterangan :

FINAL

Bogor, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Korasa Penggunaan Anggaran



PRIMA LUNA, S.TP., M.SI., PH.D.
NIP 198306082009122003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (237306) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:23 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	656,590,287	746,607,051	(90,016,764)	(12.057)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	656,590,287	746,607,051	(90,016,764)	(12.057)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	656,590,287	746,607,051	(90,016,764)	(12.057)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,365,572,187	7,783,697,049	(418,124,862)	(5.372)
Beban Persediaan	542,760,151	268,143,580	274,616,571	102.414
Beban Barang dan Jasa	4,087,163,778	4,506,618,632	(419,454,854)	(9.308)
Beban Pemeliharaan	1,782,917,939	1,846,987,105	(64,069,166)	(3.469)
Beban Perjalanan Dinas	519,811,649	295,624,800	224,186,849	75.835
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	291,552,000	201,593,900	89,958,100	44.623

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (237306) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:23 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,882,965,142	2,293,929,419	589,035,723	25.678
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	17,472,742,846	17,196,594,485	276,148,361	1.606
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(16,816,152,559)	(16,449,987,434)	(366,165,125)	2.226
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	52,610,400	(52,610,400)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	52,610,400	(52,610,400)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,656,960	89,331,026	(84,674,066)	(94.787)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,656,960	89,331,026	(84,674,066)	(94.787)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,656,960	141,941,426	(137,284,466)	(96.719)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(16,811,495,599)	(16,308,046,008)	(503,449,591)	3.087
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(16,811,495,599)	(16,308,046,008)	(503,449,591)	3.087

Keterangan :
FINAL

Bogor, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Klusa Penggunaan Anggaran



PRIMA LUNA, S.TP., M.SI., PH.D.
NIP. 198306082009122003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (237306) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:24 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	12,791,566,180,562	12,794,003,008,301	(2,436,827,739)	(0.02)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16,811,495,599)	(16,308,046,008)	(503,449,591)	3.09
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	155,080,400	(198,400,000)	353,480,400	(178.17)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	155,080,400	0	155,080,400	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(198,400,000)	198,400,000	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	20,241,729,639	14,069,618,269	6,172,111,370	43.87
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,585,314,440	(2,436,827,739)	6,022,142,179	(247.13)
EKUITAS AKHIR	12,795,151,495,002	12,791,566,180,562	3,585,314,440	0.03

Keterangan :

FINAL

Bogor, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Penggunaan Anggaran



PRIMA LUNA, S.TP., M.SI., PH.D.
NIP 198306082009122003

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (237306) BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Kode dan Nama UAPPAW : (0200) Jawa Barat

Kode dan Nama Eselon-1 : (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Kode dan Nama K/L : (018) Kementerian Pertanian

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akruai Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akruai	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetapi/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
a.	Pagu/DIPA		✓
b.	Estimasi PNPB		✓

	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU			Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun belum diregister)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		v	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		v	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		v	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		v	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Material dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak

3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	v		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		v	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		v	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		v	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resipokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)		v	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		v	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telah		v	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	v		Ya

6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		v	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Aktual?		v	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		v	Ya

Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	v		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		v	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		v	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai		v	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai		v	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

- 1 Tidak ada permasalahan di To Do List
- 2 Hibah senilai 237.225.000, merupakan pembayaran termin II yang diterima Agustus 2024 dari HIRATA, pelaksanaan tahun 2025 sudah melampirkan SPHL / SP2HL
- 3 Rekon SAKTI - SPAN tidak ada selisih
- 4 Rekon internal tidak ada selisih
- 5 Sudah dilakukan Tutup Periode bulan 12
- 6 Pengesahan Hibah Langsung Rp6.808.630, dari HIRATA berupa hibah barang peralatan Lab sudah melampirkan MPHLBJS
- 7 CaLK telah disusun dan ditandatangani KPA

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Undang T
NIP. 197205492006041014

Jakarta, 19 Januari 2026
Penelaah,

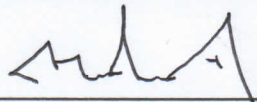
ILHAM NURCAHYA
NIP 198306302025211059

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian		Disusun oleh/Tanggal	M. Maududi Latif 27/01/2026
Inspektorat Jenderal		Direviu oleh/Tanggal	Ika Setiasih, S.P., M.Si 27/01/2026
		Direviu dan Disetujui oleh/Tanggal	Dr. Heni Nugraha, S.E., M.M. 27/01/2026
UAPA	018	Kementerian Pertanian	
UAPPA-E1	09	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	
UAKPA	237306	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
A Penyelenggaraan Akuntansi			
Telah sesuai			
B Penyajian LK:			
1. LRA			KKR LRA
Realisasi PNPB sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp661.247.247,00 atau sebesar 111,8% dari target senilai Rp591.198.000,00 sedangkan pada LO senilai Rp656.590.287,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp4.656.960,00 berupa penerimaan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, dan telah dijelaskan didalam CaLK			
Realisasi belanja pegawai senilai Rp7.365.572.187,00 telah sama dengan beban pegawai pada LO.			
2. LO			KKR LO
Telah sesuai			
3. LPE			KKR LPE
Telah sesuai			
4. Neraca			KKR Neraca
Terdapat Transfer Masuk senilai Rp350.000 dari BB Padi telah dicatat dan telah sesuai dengan neraca percobaan, namun belum dijelaskan didalam CaLBMN			
Terdapat aset PM senilai Rp3.434.373.181, aset GB Rp14.708.000, JIJ senilai Rp313.343.900, ATB senilai Rp21.375.000, Aset Tetap Lainnya Rp200.188.700 yang belum dilakukan usulan PSP dan telah dijelaskan didalam CALBMN			
aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp65,718,000 berupa kontrak konsultan perencana yang tidak jadi dilaksanakan telah dilakukan persetujuan penghapusan oleh KPKNL sesuai dengan surat nomor S-77/MK.6/KNL.0803/2024 tanggal 26 Juni 2024, dan saat dan masih menunggu SK penghapusan oleh Sekjen.			
Aset Lain-lain senilai Rp1,297,940,113 seluruhnya telah dilakukan usulan penghapusan, yang terdiri dari: - Aset lain-lain berupa kendaraan (Jeep) senilai Rp41.552.000 telah keluar risalah lelang dan saat ini masih menunggu SK Penghapusan dari Sekjen - Aset lain-lain intrakomtable dan ekstrakomtable senilai Rp1.115.238.113 telah keluar persetujuan penjualan dari Sekjen dengan nomor B-2841/PL.110/A/06/2025 tanggal 26 Juni 2025, telah dilakukan lelang namun terjadi gagal lelang dikarenakan nilai yang diajukan terlalu tinggi, sehingga perlu diajukan penurunan nilai limit ke Sekjen, - Aset lain-lain senilai Rp105.150.000 berupa deep freezer akan dilakukan permohonan lelang ke KPKNL (nilai diatas 100 juta).			
5. CaLK			KKR CaLK
CaLK telah disusun			
6. CaLBMN			KKR CaLBMN
CaLBMN telah disusun			

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

1	Berkordinasi dengan Biro KBMN Setjen atas penerbitan SK Penghapusan aset lain-lain senilai Rp41.552.000 (jeep) dan Konstruksi dalam Pekerjaan senilai Rp65.718.000
2	Segera mengajukan penurunan nilai limit atas usulan penjualan aset lain-lain senilai Rp1.115.238.113 dan segera mengajukan lelang ke KPKNL atas aset yang nilai perolehannya diatas 100 jt yaitu aset deep freezer senlai 105.150.000.
3	Mengajukan usulan PSP terhadap aset PM senilai Rp3.434.373.181, GB senilai Rp14.708.000, JIJ senilai Rp313.343.900, ATB senilai Rp21.375.000 dan Aset Tetap Lainnya Rp200.188.700.
4	Menjelaskan didalam CaLBMN atas Tranfer Masuk senilai Rp350.000

Pereyiu	Petugas Modul GLP
	
	Undang Tachdzuddin
	HP: 087873087505
M. Maududi Latif	Petugas Modul Aset Tetap
	
	Maulana Syarif Hidayat
	HP: 089604391395